



Laporan Manajemen Risiko
Tribulan I
TAHUN 2024



INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217
Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Manajemn risiko merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP (Sistem pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko.

Dengan disusunnya laporan manajemen risiko tribulan I, maka dapat dilihat gambaran risiko yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Manajemen Risiko Tribulan I Tahun 2024 disusun, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Lamongan, April 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Landasan Hukum.....	1
C Maksud dan Tujuan.....	2
D Ruang Lingkup.....	2
 BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH	 3
A Rencana Dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2024.....	 3
B Realisasi Dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2024.....	 7
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	13
BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP.....	13
BAB IV PENUTUP.....	13

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN	4
2.1 Perencanaan Kegiatan Penelitian	4
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	5
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	6
BAB IV MONITORING RISIKO DAN RENCANA	7
BAB V PENUTUP	8

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko.

Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Oleh sebab itu Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu melakukan manajemen risiko, sehingga diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman

- Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I TAHUN 2024

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Kapabilitas APIP, tentunya memiliki risiko sebagaimana berikut:

1. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Lamongan turun
2. Turunnya Level Kapabilitas APIP

Untuk pencapaian indikator kinerja operasional, terdapat beberapa risiko sebagaimana berikut:

1. Laporan Kegiatan tidak tepat waktu
2. Pengawasan tidak sesuai dengan SOP dan melanggar kode etik
3. Perubahan jadwal dalam melakukan pengawasan
4. APIP Menerima gratifikasi
5. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan terlambat
6. Penyajian data hasil pengawasan tidak up-to-date
7. Penyusunan Rencana Kebijakan Pengawasan tidak tepat waktu
8. Target Kegiatan tidak tercapai
9. Kebijakan (Produk hukum : Perbup, SK, SOP) yang diajukan tidak Terbit
10. Penyusunan jadwal kegiatan tidak tepat
11. Pagu Anggaran terbatas
12. Realisasi kegiatan tidak sesuai Target

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis dan indikator kinerja operasional Inspektorat Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir pada Form 9 (**Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern**) di bawah ini.

FORM 9.
FORMULIR KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNAL II TAHUN 2024

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Risiko Strategis Inspektorat:					
1.	Monitoring data pada aplikasi	Evaluasi data pada aplikasi	Irban wilayah 2	November 2024	-	Belum teralisasi
2.	Penilaian mandiri Kapabilitas APIP dan Koordinasi dengan BPKP	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Penilaian mandiri Kapabilitas APIP	Inspektur dan Asisten administrasi umum sekda Kab Lamongan	Juli 2024	-	
	Risiko Operasional Inspektorat:					
1.	Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Hasil Pemeriksaan	Irban Wil dan Kasubbag Evalap	Juli dan Desember 2024	-	Belum realisasi
2.	Laporan Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Kode Etik	Konfirmasi dan Laporan Pelaksanaan Kode Etik oleh APIP	Kasubbag Umum	Desember 2024	-	Belum realisasi
3.	Monitoring pelaksanaan PKPT	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan konsultasi serta Laporan Pelaksanaan PKPT	Kasubbag Evalap	Januari - Desember 2024	Maret 2024	Register LHP Tribunal I
4.	Membuat Surat Edaran tentang pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya	Konfirmasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan Monev pelaksanaan Budaya anti korupsi	Irban Investigasi	April 2024	Maret 2024	Surat Edaran Bupati Lamongan, tanggal 27 Maret 2024, Nomor: 700/245/413.201/2024 tentang Laporan Atas Penerimaan Gratifikasi pada hari Raya Idul Fitri 1445 H.

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK DURING THE YEAR 1900

GENERAL STATEMENT

No.	Name of the person or persons	Rank	Place of birth	Date of birth	Date of death	Cause of death	Place of death	Date of burial	Place of burial	Remarks

The following table gives a summary of the work done during the year 1900. It is divided into two parts, the first giving the names of the persons who have died, and the second giving the names of the persons who have been buried.

The first part of the table gives the names of the persons who have died during the year 1900. It is divided into two columns, the first giving the names of the persons who have died of natural causes, and the second giving the names of the persons who have died of unnatural causes.

The second part of the table gives the names of the persons who have been buried during the year 1900. It is divided into two columns, the first giving the names of the persons who have been buried in the cemetery, and the second giving the names of the persons who have been buried in the churchyard.

The following table gives a summary of the work done during the year 1900. It is divided into two parts, the first giving the names of the persons who have died, and the second giving the names of the persons who have been buried.

The following table gives a summary of the work done during the year 1900. It is divided into two parts, the first giving the names of the persons who have died, and the second giving the names of the persons who have been buried.

The following table gives a summary of the work done during the year 1900. It is divided into two parts, the first giving the names of the persons who have died, and the second giving the names of the persons who have been buried.

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Peman-tauan	Rencana Waktu Pelaksa-naan Peman-tauan	Realisasi Waktu Pelaksa-naan	Keterangan
5.	Monitoring LHP	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan monitoring pemenuhan tin-daklanjut hasil pengawasan oleh perangkat daerah	Inspektur dan Asisten ad-ministrasi umum sekda kab lamongan	Juli 2024	-	Belum realisasi
6.	Monitoring E-TLHP dan pemeli-haraan Aplikasi Sidak Lamong	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan monitoring pemenuhan tin-daklanjut hasil pengawasan oleh perangkat daerah	Inspektur dan Asisten ad-ministrasi umum sekda kab lamongan	November 2024	-	Belum realisasi
7.	Rapat Koordinasi terkait adanya perubahan Regulasi dan Inven-tarisasi Regulasi, Sosialisasi aturan baru ke internal APIP, Evaluasi RTP, Perbaikan Pro-gram Kerja Per Irbn, Pelaporan Budaya anti korupsi melalui La-por WBS	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan anti korupsi dan Laporan Capaian Kinerja dan budaya anti korupsi	Inspektur dan Asisten ad-ministrasi umum sekda kab lamongan	Desember 2024	-	Belum realisasi
8.	Menurunkan target sesuai dengan anggarannya, Monitoring Laporan kinerja	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur dan Asisten ad-ministrasi umum sekda kab lamongan	Juli 2024	-	Belum realisasi
9.	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Kebijakan yang diajukan	Konfirmasi pengajuan kebijakan dan monitoring pelaksanaan ke-bijakan	Inspektur dan Asisten ad-ministrasi umum sekda kab lamongan	November 2024	-	Belum realisasi
10	Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Kemenpan RB dan Ba-gian Organisasi)	Konfirmasi pelaksanaan PMPRB dan PMP ZI dan Reviu terhadap komitmen Perangkat Daerah	Inspektur dan Asisten ad-ministrasi umum sekda kab lamongan	Mei 2024	26 Maret 2024 dan 12 juni	Monitoring Evaluasi Rencana Aksi RB Tribulan IV 2023 Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Peman-tauan	Rencana Waktu Pelaksa-naan Peman-tauan	Realisasi Waktu Pelaksa-naan	Keterangan
					2024	Terhadap Rencana Aksi RB Tahun 2024
11.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur dan Asisten ad-ministrasi umum sekda kab lamongan	Desember 2024	-	Belum realisasi
12.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja	Inspektur dan Asisten ad-ministrasi umum sekda kab lamongan	Desember 2024	-	Belum realisasi

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2024

Inspektorat Kabupaten Lamongan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada Tribulan II, dapat dijelaskan pada Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian risiko (*Risk Event*) dan RTP, sebagaimana pada Form 10 di bawah ini.

Form 10.

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TERIBULAN II TAHUN 2024

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis Pemda										
1	Nilai Maturlas SPIP Kabupaten Lamongan turun	RSP.23.35.04.01	Desember 2023	OPD belum mendokumentasikan perencanaan, pelaksanaan, monev kegiatan, dengan baik	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan menurun	-	Monitoring data pada aplikasi	November 2024	-	Belum realisasi
2	Turunnya Level Kapabilitas APIP	RSO.23.35.4.02	Belum terjadi	Tidak terpenuhinya elemen-elemen penilaian Kapabilitas APIP	Kualitas hasil pemeriksaan menurun	-	Penilaian mandiri Kapabilitas APIP dan Koordinasi dengan BPKP	Juli 2024	-	Belum realisasi

No	Risiko yang Teridentifikasi-kasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP		Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan	
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak							
Risiko Operasional OPD Inspektorat:												
1	Risiko operasional kegiatan lapotan tidak tepat waktu	23.03.04.01		Kurangnya sarana, prasarana dan data pendukung	Target kinerja tidak tercapai	-	Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan		Juli dan Desember 2024	-	Belum realisasi	
2	Pengawasan tidak sesuai SOP dan melanggar kode etik	RSO 23.35.4.02		Auditor yang kurang memahami dasar-dasar tentang kode etik	Dapat menurunkan kualitas pengawasan sehingga dapat berdampak pada kesalahan dalam mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan	-	Laporan Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Kode Etik		Desember 2024	-	Belum realisasi	
3	Perubahan jadwal dalam melakukan pengawasan	RSO 23.35.4.03		Adanya tugas mandatory yang mendesak dan belum masuk di jadwal pengawasan	Program Kerja tidak sesuai dengan jadwal	-	Monitoring pelaksanaan PKPT		Januari - Desember	Maret	Register LHP Tribunal I	

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
4	APIP Menerima gratifikasi	ROO 23.35.04.04	belum terjadi	Merasa tidak enak hati kalau dikasih tidak di terima	Integritas APIP menurun	-	Membuat Surat Edaran tentang pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya	April 2024	Maret 2024	Surat Edaran Bupati Lamongan, tanggal 27 Maret 2024, Nomor: 700/245/413.201/2024 tentang Laporan Atas Penerimaan Gratifikasi pada hari Raya Idul Fitri 1445 H.
5	Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan terlambat	ROO 23.35.04.05	belum terjadi	Data yang dibutuhkan belum lengkap	Target tidak tercapai		Monitoring LHP	Juli 2024	-	Belum realisasi
6	Penyajian data hasil pengawasan tidak up-to-date	ROO 23.35.04.06		Laporan hasil Pengawasan tidak tepat waktu	Rekomendasi kadaluarsa		Monitoring E-TLHP dan pemeliharaan Aplikasi Sidak Lamong	November 2024	-	Belum realisasi
7	Penyusunan Rencana Kebijakan Pengawasan tidak tepat waktu	RSO 23.35.04.07	-	Belum adanya kebijakan di atasnya	Pelaksanaan Pengawasan tidak tepat waktu		Rapat Koordinasi terkait adanya perubahan Regulasi dan Inovarisasi Regulasi, Sosialisasi aturan baru ke internal APIP, Evaluasi RTP,	Desember 2024	-	Belum realisasi

									Perbaikan Program Kerja Per Irbab, Pelaporan Budaya anti korupsi melalui Lapir WBS				
8	Target Kegiatan tidak tercapai	ROO 23.35.04.08	-	Refokusing anggaran	Kegiatan tidak maksimal				Menurunkan target sesuai dengan anggarannya, Monitoring Lapiran kinerja	Juli 2024	-	Belum realisasi	
9	Produk hukum (Perbup, SK, SOP) yang diajukan tidak Terbit	ROO 23.35.04.09		1. Aturan tidak jelas dan tidak ada harmonisasi kebijakan 2. Kebijakan tidak disetujui	1. Target Kinerja Organisasi tidak tercapai 2. Ada Komplain dari Objekek Pemerintah karena tidak ada dasar hukum				Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Kebijakan yang diajukan	November 2024	-	Belum realisasi	
10	Penyusunan jadwal kegiatan tidak tepat	ROO 23.35.04.10		Petunjuk teknis terkait time schedule pen-ampingan RB dan ZI terlambat turun	Pelaksanaan kegiatan ter- lambat				Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Kemenpan RB dan Bagian Organisasi)	Mei 2024	26 Maret 2024 dan 12 Juni 2024	Monitoring Evaluasi Rencana Aksi RB Tribunal IV 2023 Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Terhadap Rencana Aksi RB Tahun 2024	

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
11	Pagu Anggaran terbatas	ROO 23.35.04.11		Refocusing anggaran	Kegiatan tidak maksimal		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Desember 2024	-	Belum realisasi
12	Realisasi kegiatan tidak sesuai Target	ROO 23.35.04.12		Rendahnya SDM PD dan APIP terkait pemahaman SPIP, RB, ZI, MR	Nilai SPIP, RB, MCP turun		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Desember 2024	-	Belum realisasi

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Inspektorat belum ada.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I Tahun 2024 ada 2 (dua) kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I sudah dilaksanakan dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

II. THE SPATIAL RELATIONSHIP ANALYSIS

The spatial relationship analysis is a method of analyzing the spatial distribution of a phenomenon. It is a method of analyzing the spatial distribution of a phenomenon. It is a method of analyzing the spatial distribution of a phenomenon.

IV. MONITORING RISK ANALYSIS

The monitoring risk analysis is a method of analyzing the spatial distribution of a phenomenon. It is a method of analyzing the spatial distribution of a phenomenon. It is a method of analyzing the spatial distribution of a phenomenon.

V. CONCLUSION

The conclusion is a method of analyzing the spatial distribution of a phenomenon. It is a method of analyzing the spatial distribution of a phenomenon. It is a method of analyzing the spatial distribution of a phenomenon.

